

PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM E-MUSRENBANG TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN: PENGANGGARAN PARTISIPATIF SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Lailatun Rohmatulloh

lailatun026@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to examine empirically the influence of the use of E-Musrenbang system to the effectiveness of development planning at Local Government Work Units of Surabaya city. This research is also aimed to examine empirically whether participatory budgeting moderates the use of E-Musrenbang to the effectiveness of development planning at Local Government Work Units of Surabaya city. The sample collection technique has been carried out by using purposive sampling method. The data has been obtained by issuing questionnaires to the employees of Local Apparatus Organization which has authority in Musrenbang process, so 16 district level Local Apparatus Organizations and Planning and Development Agencies of Surabaya city have been selected as samples. The analysis technique has been carried out by using simple regression analysis to examine the influence of the use of E-Musrenbang system to the effectiveness of development planning. Meanwhile, in order to examine participatory budgeting the moderating variable has been conducted by using Moderate Regression Analysis. The result of the research shows that the use of E-Musrenbang system gives positive influence to the effectiveness of development planning. On the contrary, the participatory budgeting cannot moderate the influence of the use of E-Musrenbang to the effectiveness of development planning.

Keywords: E-Musrenbang system, development planning, participatory budgeting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan pada unit kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji secara empiris apakah penganggaran partisipatif memoderasi penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan pada unit kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuisioner kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki otoritas dalam proses Musrenbang, sehingga didapatkan sampel sebanyak 16 Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kecamatan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. Sedangkan untuk menguji penganggaran partisipatif sebagai variabel pemoderasi menggunakan *Moderate Regression Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem E-Musrenbang berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. Sedangkan penganggaran partisipatif tidak dapat memoderasi pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: Sistem E-Musrenbang, Perencanaan Pembangunan, Penganggaran Partisipatif.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh

karena itu, pembangunan nasional yang baik dapat dijalankan dengan didasarkan pada suatu perencanaan yang matang serta didukung alat komunikasi yang memadai, sehingga keinginan dan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut terlaksana dengan baik.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif merupakan Paradigma pembangunan yang sekarang, yaitu keterlibatan masyarakat sebagai salah satu substansi dalam perencanaan pembangunan. Dalam pembangunan tersebut pemerintah berusaha untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang sangat banyak baik jumlah maupun ragamnya dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan kepentingan masyarakat, banyak yang harus didahulukan serta sumber daya yang tersedia dalam rangka mensejahterakan masyarakat sangat diperhatikan.

Bappenas (2005) dalam Sigalingging dan Warjio (2014:91) mengemukakan bahwa permasalahan inkonsistensi kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurang efektifnya penilaian kinerja mendominasi proses perencanaan pembangunan. Seiring dengan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah, maka UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diterbitkan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pendekatan *top-down* dan partisipatif sesuai amanat UU No. 25 tahun 2004 diterapkan dalam sebuah bentuk rangkaian musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Rangkaian forum musrenbang ini menjadi bagian dalam proses penyusunan sistem perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Melalui rangkaian musrenbang, masyarakat mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi mereka dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Musrenbang dapat dikatakan sebagai jalur utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuan perencanaan pembangunan dan penetapan anggaran. Melalui jalur inilah mayoritas aspirasi masyarakat disalurkan sebagai masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya. Walaupun dikatakan sebagai jalur utama aspirasi masyarakat, aspirasi yang disampaikan dijalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur yang paling lemah pada proses perumusan agenda dan usulan kegiatan. Masyarakat tidak banyak tahu seberapa besar peluang usulannya yang ditampung dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan atau seberapa besar persentase kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang berasal dari aspirasi musrenbang. Didalam masyarakat sendiri terdapat hambatan kultur yang membuat iklim dan lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadi partisipasi. Kejadian yang sering dijumpai dalam pelaksanaan musrenbang yakni dari sekian banyak masyarakat yang diundang dalam sebuah forum yang berani mengutarakan pendapat hanya segelintir orang, sebagian besar yang lain hanya diam tidak berpendapat bahkan menginginkan forum tersebut segera disudahi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, untuk semakin memperluas ruang partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, rangkaian forum musrenbang tidak hanya diwujudkan melalui instrumen yang manual dan formal seperti yang dilakukan selama ini. Seiring dengan modernisasi teknologi, penyerapan aspirasi dan partisipasi masyarakatpun dapat dilakukan secara efektif melalui aplikasi E-Musrenbang (*Electronic* Musyawarah Perencanaan Pembangunan). E-Musrenbang merupakan sebuah inovasi yang diadopsi dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan E-Musrenbang dinilai mampu membuka ruang partisipasi masyarakat dari segala tingkatan untuk memberikan aspirasi terkait pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan menjaga konsistensi

data mulai dari perencanaan hingga realisasi kegiatan pembangunan. Sistem ini juga akan menjaga kesesuaian data RKPD. E-Musrenbang sendiri memiliki beberapa level pengguna sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini, Bappeda dapat memaksimalkan fungsinya sebagai perencana, pengendali, evaluator dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan musrenbang karena semua telah disusun otomatis dalam sistem dan sistem juga mampu menyajikan output yang informatif bagi berbagai pihak. Pemerintah akan terbantu dalam penyelarasan, klasifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten/Kota.

Penggunaan sistem E-Musrenbang tidak hanya secara langsung mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan, tetapi juga pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang dimoderasi variabel lain yaitu penganggaran partisipatif. Anggaran berisi tentang ringkasan rencana-rencana keuangan organisasi di masa mendatang, hal ini merupakan peran anggaran sebagai perencanaan. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Proses penganggaran yang melibatkan masyarakat dalam penyusunannya disebut dengan penganggaran partisipatif, dimana akuntabilitas, partisipasi dan transparansi lebih dikedepankan. Sehingga perencanaan pembangunan daerah akan lebih efektif dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penentuan anggaran pembangunan. Penganggaran partisipatif memungkinkan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan disinergikan dengan penentuan anggaran pembangunan untuk pencapaian target pembangunan. Tingkat kebutuhan masyarakat dapat ditentukan dengan penyusunan anggaran sektor publik (Mardiasmo, 2004:61).

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apakah penggunaan Sistem E-Musrenbang berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. (2) Apakah penganggaran partisipatif dapat memoderasi pengaruh penggunaan Sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menguji secara empiris pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. (2) Menguji secara empiris pengaruh penganggaran partisipatif sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

TINJAUAN TEORITIS

Perencanaan Pembangunan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Riyadi dan Deddy (2005:7) dalam Dwiandini dan Salomo (2013) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan dimana fakta-fakta menjadi dasar untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008, dengan kombinasi lima pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan partisipatif. Merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut dengan istilah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Anggaran dan Penganggaran

Perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Rencana keuangan jangka pendek (tahunan) yang lebih konkret akan diterjemahkan kedalam anggaran. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Selain itu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Public Sphere*), anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi massa lain harus bisa terlibat dalam proses penganggaran publik (Mardiasmo, 2004).

Penganggaran Partisipatif

Proses pengambilan keputusan melalui perundingan dan bernegosiasi oleh masyarakat atas distribusi sumber daya publik (Anwar Shah, 2007 dalam Dwiandini dan Salomo, 2013). Penganggaran partisipatif merupakan salah satu wujud dilaksanakannya reformasi penganggaran, yaitu penyusunan anggaran yang mengedepankan dan mengacu prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Dalam penyusunannya, partisipasi masyarakat sangatlah penting agar menciptakan penganggaran yang partisipatif. Dalam penganggaran partisipatif, penganggaran tidak diputuskan oleh segelintir elit politik, pemerintah dan ahli di belakang pintu, melainkan oleh rakyat secara keseluruhan. Proses pendiskusian, perdebatan dan konsultasi harus melibatkan rakyat secara langsung untuk menentukan jumlah anggaran dan pengeluarannya, sehingga anggaran publik dapat menyentuh rakyat karena teralokasi melalui anggaran partisipatif.

Musrenbang dan Peraturan yang Mendasarinya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan media partisipasi publik yang digunakan untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Kegiatan Musrenbang diawali dari tingkat bawah yaitu desa/kelurahan. Musrenbang dilaksanakan untuk mendukung UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan partisipasi masyarakat diatur dalam PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan implementasi pelaksanaannya didasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Electronic Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*).

Aplikasi ini disusun berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010. Penyusunan laporan yang dahulu dilakukan secara manual pasti akan memakan waktu yang lama, namun dengan bantuan aplikasi ini semua data dapat diinput dan diakses hanya dalam hitungan detik. Data dapat diekspor ke dalam bentuk *file excel* sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan.

Konsep Efektivitas

Dwiandini dan Salomo (2013) mengemukakan terdapat beberapa ukuran efektivitas, salah satu ukuran efektivitas adalah *Participation and shared influence*, yakni melihat sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam membuat satu keputusan atau kebijakan yang secara langsung mempengaruhi mereka atau berdampak langsung bagi mereka. Usulan-usulan pembangunan yang telah disepakati dan diputuskan bersama oleh para *stakeholder* yang tertuang dalam hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui E-Musrenbang dianggap sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan

Kualitas pembangunan menjadi penentu keberhasilan pembangunan di suatu wilayah (Yunas, 2017). Penggunaan sistem E-Musrenbang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, dengan aplikasi E-Musrenbang data-data yang berisi usulan masyarakat terklasifikasi dengan baik sehingga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang relevan dan akurat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karuniawati (2017) menunjukkan bahwa dari presentase skor jawaban variabel efektivitas sebesar 87,5% menunjukkan bahwa penerapan E-Musrenbang dalam perencanaan pembangunan berjalan efektif di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Penelitian E-Musrenbang juga dibahas oleh Masrizal (2016) dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem E-Musrenbang dalam kegiatan musyawarah rencana aksi perempuan serta hubungannya dengan rencana pembangunan kampung di daerah tersebut telah memberikan edukasi bagi kelompok perempuan di Aceh. Adapun penelitian yang dilakukan Fadil (2013) mengenai pelaksanaan musrenbang manual yang dilakukan di Kelurahan Kotabaru Tengah, adanya keterbatasan waktu dalam penyampaian informasi antara masyarakat dan pihak pemerintah sehingga proses perencanaan pembangunan terhambat.

Perencanaan pembangunan merupakan awal dari proses pembangunan yang memerlukan sasaran waktu yang jelas. Hal ini disebabkan oleh prioritas pembangunan yang mendesak untuk diaktualisasi, tahapan perencanaan pembangunan dilaksanakan mulai dari satuan pemerintahan terendah hingga ke pemerintah daerah (Setianingsih *et al.*, 2015). Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan terdapat perbedaan hasil antara penerapan sistem E-Musrenbang dengan musrenbang manual, maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

H1: Penggunaan sistem E-Musrenbang berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

Pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan dengan penganggaran partisipatif sebagai variabel pemoderasi

Penganggaran partisipatif memungkinkan proses pendistribusian atau alokasi anggaran publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dimana prinsip partisipasi mengandung maksud bahwa penjangkauan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya memberdayakan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan masyarakat tercermin dalam usulan-usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat melalui musrenbang. Peran anggaran dalam hal ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Kemungkinan buruk dan ketidak pastian kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang yang harus dihadapi oleh seorang manager dimana akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil dalam mengelola perusahaannya, maka

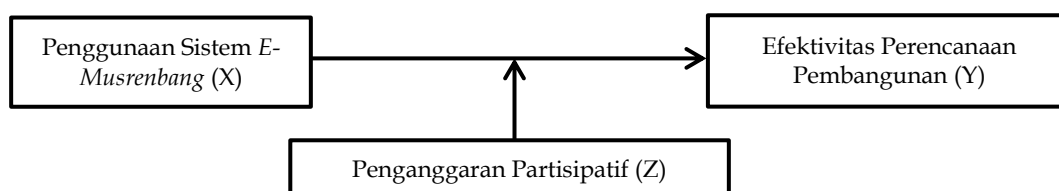
ditetapkan suatu anggaran terlebih dahulu sehingga kebutuhan yang mempengaruhi rencana operasional perusahaan dapat diramalkan diawal. Penyusunan anggaran yang komprehensif dapat mempermudah diadakan evaluasi atas hasil pelaksanaan yaitu dengan melaporkan hasil pelaksanaan yang sesungguhnya, yang kemudian akan dibandingkan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Anggaran dapat mencegah terjadinya penghamburan sumberdaya baik bagi perusahaan swasta maupun pemerintah karena rencana kegiatan telah terkoordinasi didalamnya (Yusri, 2016).

Penjelasan atas PP No. 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah salah satunya dimaksudkan untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. Dijelaskan pula dalam Pasal 17 (4) PP No. 8 Tahun 2008, Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penganggaran partisipatif dapat dijadikan sebagai pendukung efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat, karena perumusannya melibatkan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

H2: Penganggaran partisipatif sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

Model Penelitian

Gambar berikut ini menjelaskan pengaruh penganggaran partisipatif terhadap hubungan antara penggunaan sistem E-Musrenbang dengan efektivitas perencanaan pembangunan:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:12) paradigma kuantitatif lebih ditekankan pada pengujian teori-teori dengan pengukuran variabel-variabel penelitian menggunakan angka dan prosedur statistik digunakan untuk analisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat secara aktif dalam menggunakan E-Musrenbang untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999:131). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Kota Surabaya. Organisasi Perangkat Daerah yang secara aktif terlibat dalam proses perencanaan

pembangunan adalah OPD Kecamatan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko). Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengambil 16 OPD tingkat kecamatan dan Bappeko di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sesuai kriteria tersebut diatas maka setiap kecamatan diberikan 4 kuisioner. Berdasarkan kriteria tersebut diatas maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 responden. Responden tersebut merupakan Pegawai yang terlibat secara aktif dalam penggunaan sistem E-Musrenbang, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan perencanaan pembangunan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah metode survei, dengan menggunakan teknik kuisioner. Teknik kuisioner adalah penelitian yang berupa gambaran umum tentang karakteristik populasi yang digambarkan oleh sampel dan menggunakan kuisioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden guna memperoleh data yang objektif dan valid, dimana pengambilan sampel diharapkan mampu mewakili keberadaan populasi sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dan dapat diambil suatu kesimpulan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penggunaan Sistem E-Musrenbang

Penggunaan sistem E-Musrenbang adalah variabel independen dalam penelitian ini. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Data informasi yang menjadi indikator untuk mengukur sistem E-Musrenbang adalah kelebihan E-Musrenbang (Pemerintah Kota Surabaya, 2014) terdiri dari 5 indikator, yaitu: (1) Pemasukan data/usulan, foto dan peta spasial secara *online*. (2) Data secara sistem langsung terklasifikasi. (3) Masyarakat dapat mengetahui secara *online* proses dan status usulan. (4) Adanya kepastian pagu anggaran setiap kelurahan dan standar harga yang dibutuhkan. (5) Efisien dalam pemakaian kertas (*paperless*) dan penghematan anggaran untuk cetak dokumen. Daftar pertanyaan tersebut digunakan untuk menilai manfaat yang diperoleh responden dari penerapan sistem E-Musrenbang dan pengaruhnya pada efektivitas perencanaan pembangunan dan penganggaran partisipatif. Jenis pengukuran kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan skor terendah (point 1) sedangkan skor tertinggi (point 5). Dimana skor 1 (Sangat Jelek), skor 2 (Jelek), skor 3 (Sedang), skor 4 (Baik), skor 5 (Sangat Baik).

Efektivitas Perencanaan Pembangunan

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas perencanaan pembangunan. Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Efektivitas perencanaan pembangunan diukur menggunakan indikator efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah menurut Badan Penelitian dan Pembangunan (2010) dalam Setianingsih, *et al.* (2015) yaitu: (1) Satuan Waktu. (2) Satuan Hasil. (3) Kualitas Kerja. (4) Kepuasan Masyarakat. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran efektivitas perencanaan pembangunan. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert dengan skor terendah (point 1) sedangkan skor tertinggi (point 5). Dimana skor 1 (Sangat Jelek), skor 2 (Jelek), skor 3 (Sedang), skor 4 (Baik), skor 5 (Sangat Baik).

Penganggaran Partisipatif

Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah penganggaran partisipatif. Variabel pemoderasi, yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antar variabel independen dengan variabel dependen (Indriantoro dan Supomo,

1999: 64). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah penganggaran partisipatif yang diukur menggunakan 3 instrumen yang dikembangkan oleh Kren (1992) dalam Alim (2008), antara lain: (1) Keterlibatan. (2) Pengaruh. (3) Kontribusi. Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk mengetahui penganggaran partisipatif. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert dengan skor terendah (point 1) sedangkan skor tertinggi (point 5). Dimana skor 1 (Sangat Jelek), skor 2 (Jelek), skor 3 (Sedang), skor 4 (Baik), skor 5 (Sangat Baik).

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kuisisioner kepada kepala OPD sampai dengan 3 (tiga) tingkat di bawah kepala OPD pada organisasi sampel. Jumlah kuisisioner yang dibagikan sebanyak 85 (delapan puluh lima). Untuk efektivitas pengumpulan data, kuisisioner dibagikan dengan teknik kuisisioner secara personal (*Personally Administered Questionnaires*) yang dibagikan secara langsung kepada responden. Dari 85 kuisisioner, yang dibagikan terdapat 88% responden yang mengembalikan kembali jawaban mereka. Sehingga dalam analisis akhir terdapat 75 (88%) kuisisioner yang diikuti.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Valid atau tidaknya suatu kuisisioner diukur melalui uji validitas (Ghozali, 2006:45). Apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, serta memenuhi kriteria $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan kuisisioner dinyatakan valid ($\alpha=5\%$) maka kuisisioner dinyatakan valid. Adapun uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk (Ghozali, 2006:41). Teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah *Cronbach Alpha*. Nunnally (1994) dalam Ghozali (2016:48) mengatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit-penyakit dalam data. Uji asumsi klasik yang digunakan penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak digunakan karena data yang digunakan tidak berbentuk deret waktu, karena autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data deret waktu.

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda berdistribusi normal atau tidak normal. Menurut Ghozali (2016:154) untuk mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan melihat normal probability plot. Jika data menyebar dekat dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas juga dilakukan dengan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-smirnov (1-sample K-S)*. Jika hasil *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2016:103). Jika terjadi korelasi, berarti terjadi masalah multikolinearitas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, penelitian ini menggunakan teknik *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. dengan ketentuan: (a) Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila $VIF \geq 10$ maka terdapat masalah multikolinearitas. (b) Bila nilai

tolerance > 0,1 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila nilai *tolerance* ≤ 0,1 maka terdapat masalah multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *studentized residual* (SRESID) dan *standardized predicted value* (ZPRED), dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual dari (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*standardized*. Dasar pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. (b) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Disamping memperhatikan grafik *scatterplot*, pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan dengan uji glejser. Gujarati (dalam Ghozali, 2016:137) menjelaskan bahwa uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen tidak signifikan yaitu tingkat kepercayaan > 0,05 secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Pengujian Model

Uji kesesuaian model (*goodness of fit*) juga dikenal dengan uji F. Uji model/ uji anova digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Hal ini dapat diketahui melalui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji kesesuaian model ini dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, (H_0 ditolak H_a diterima) maka model signifikansi atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada anova. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, apabila nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Selain menggunakan uji F, untuk menguji kelayakan model perlu menggunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

Uji Hipotesis

Hipotesis Satu (H1)

Hipotesis 1 diuji menggunakan analisis regresi sederhana.

H1: Penggunaan sistem E-Musrenbang berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

Persamaan statistik yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X \dots\dots\dots(1)$$

Uji Hipotesis Dua (H2)

Hipotesis 2 diuji menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA). MRA adalah aplikasi khusus dari analisis regresi linier berganda, yang persamaan regresinya meliputi hubungan interaksi. Hartmann dan Mores (dalam Riharjo, 2009) menyatakan bahwa teknik statistik untuk menguji pengaruh interaksi yang dinyatakan dalam pengujian hipotesis kontingensi adalah MRA.

H2: Penganggaran partisipatif sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh antara penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

Persamaan statistik yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X + b_2 Z \dots\dots\dots(2)$$

$$Y = \alpha + b_1 X + b_2 Z + b_3 X*Z \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- X = Penggunaan Sistem E-Musrenbang
 Y = Efektivitas Perencanaan Pembangunan
 Z = Penganggaran Partisipatif
 X*Z = Interaksi antara Penggunaan Sistem E-Musrenbang dan Penganggaran Partisipatif
 α = Konstanta
 b1, b2, b3 = Koefisien Regresi

Jika koefisien b3 dari persamaan 3 menunjukkan nilai yang signifikan, maka pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan dimoderasi oleh penganggaran partisipatif.

Adapun kriteria MRA yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan apakah variabel penganggaran partisipatif (Z) benar-benar merupakan variabel pemoderasi atau tidak, Sugiono (2004) menggunakan pendekatan *Moderate Regression* mengelompokkan variabel moderator sebagai berikut: (a) Bila persamaan (2) b2Z, b2 signifikan dan persamaan (3) b3 X*Z, b3 tidak signifikan, maka variabel Z bukan variabel moderator, tapi merupakan suatu variabel independen, *intervening, exogenous, antecedent*, atau prediktor. (b) Bila persamaan (2) b2Z, b2 tidak signifikan dan persamaan (3) b3 X*Z, b3 signifikan, maka Z merupakan *Pure Moderator* (Z merupakan variabel moderator murni). (c) Bila persamaan (2) b2Z, α_2 tidak signifikan dan persamaan (3) b3 X*Z, b3 tidak signifikan, maka variabel Z merupakan *Homologizer Moderator*. (d) Bila persamaan (2) b2Z, b2 signifikan dan persamaan (3) b3 X*Z, b3 signifikan, maka variabel Z merupakan suatu *Quasi Moderator*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari tanggapan 75 responden mengenai 5 pertanyaan pada variabel penggunaan sistem E-Musrenbang, 7 pertanyaan pada variabel efektivitas perencanaan pembangunan, 6 pertanyaan pada variabel penganggaran partisipatif kemudian diolah menggunakan program SPSS versi 21. maka diperoleh hasil olahan data yang disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	r _{hitung}	Keterangan
1	Penggunaan Sistem E-Musrenbang	0,856	0,746 s.d. 0,836	Reliable/Valid
2	Efektivitas Perencanaan Pembangunan	0,853	0,654 s.d. 0,797	Reliable/Valid
3	Penganggaran Partisipatif	0,846	0,687 s.d.0,792	Reliable/Valid

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai validitas dari r tabel untuk seluruh indikator variabel independen, dependen, dan pemoderasi adalah sebesar 0,227 sehingga seluruh item variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid, karena kisaran r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel}. Hasil pengolahan data didukung dengan nilai *Cronbach Alpha* untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,70, artinya seluruh variabel dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang diperoleh, dapat dilakukan pengujian selanjutnya karena seluruh indikator pengukuran yang dipergunakan dalam penelitian ini baik variabel independen, variabel dependen, dan variabel pemoderasi dikatakan valid dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan *non-parametrik Kolmogorov-smirnov (1-sampel K-S)*. Data dinyatakan terdistribusi normal jika hasil *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05. Adapun hasil pengujian normalitas menggunakan uji statistic *1-Sampel K-S* disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Model	Nilai Signifikansi
$Y = \alpha + b1 X + b2 Z$	0,111

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa tingkat signifikansi pada model regresi (2) adalah diatas 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai residual berdistribusi normal terpenuhi dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikoinearitas, penelitian ini menggunakan teknik *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Berdasarkan persamaan regresi yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 21, adapun hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model Regresi	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
$Y = \alpha + b1 X + b2 Z$		
Penggunaan sistem E-Musrenbang (X)	0,767	1,303
Penganggaran Partisipatif (Z)	0,767	1,303

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* pada model regresi tersebut lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam peneitian ini dilakukan dengan uji glejser. Berdasarkan persamaan regresi yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS versi 21, adapun hasil uji glejser disajikan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Glejser

Model	Nilai Signifikansi
$Y = \alpha + b1 X + b2 Z$	
Penggunaan sistem E-Musrenbang (X)	0,148
Penganggaran Partisipatif (Z)	0,713

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Pengujian kelayakan model regresi dalam penelitian ini menggunakan F-test atau Uji F sehingga nilai koefisien regresi secara bersama-sama dapat diketahui. Selain menggunakan uji F, untuk menguji kelayakan model perlu menggunakan koefisien determinasi (R^2). Berikut ini adalah hasil pengujian:

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	298,729	2	149,364	44,436	0,000
Residual	242,018	72	3,361		
Total	540,747	74			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Z, X

Sumber: Data primer diolah

Nilai P value sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05 menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen dan moderasi pada variabel dependen layak untuk digunakan. Didukung dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,743	0,552	0,540	1,83340

a. Predictors: (Constant), Z, X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R) sebesar 0,743 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 74,3%, artinya variabel bebas penggunaan sistem E-Musrenbang (X) dan penganggaran partisipatif (Z) mempunyai hubungan yang kuat dengan efektivitas perencanaan pembangunan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 55,2%, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variasi yang terjadi pada variabel efektivitas perencanaan pembangunan (Y) sebesar 55,2% dipengaruhi atau disebabkan oleh perubahan yang terjadi secara bersama-sama pada variabel penggunaan sistem E-Musrenbang dan penganggaran partisipatif sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi tersebut.

Uji Hipotesis

Pengaruh Penggunaan Sistem E-Musrenbang terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan

Pengujian hipotesis ini ditujukan untuk menguji pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang sebagai variabel independen terhadap efektivitas perencanaan pembangunan sebagai variabel dependen, maka metode yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil regresi untuk menguji hipotesis pertama disajikan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi
Pengaruh Penggunaan Sistem E-Musrenbang Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan

Simbol	Variabel	Nilai Koefisien	Standar Error	t-value	P
Persamaan Regresi : $Y = \alpha + b_1 X$					
	Konstanta	α (14,693)	2,503	5,870	0,000
X	Penggunaan Sistem E-Musrenbang	b_1 (0,669)	0,118	5,678	0,000
		$R^2=0,306$	$F=32,245$	$P=0,000$	$n=75$

Sumber: Data primer diolah

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut adalah:
 $Y = 14,693 + 0,669 X$

Berdasarkan hasil output analisis regresi sederhana pada tabel 7, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,306 atau 30,6% artinya variabel penggunaan sistem E-Musrenbang berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan pembangunan sebesar 30,6% dan sisanya 69,4% dijelaskan oleh faktor lain. Nilai F sebesar 32,245, signifikan pada $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi penggunaan sistem E-Musrenbang akan semakin tinggi efektivitas perencanaan pembangunan, dengan demikian hipotesis satu (H_1) yang menduga penggunaan sistem E-Musrenbang berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pembangunan, dapat diterima.

Dari tabel 7 dapat ditarik penjelasan dari hasil uji t yang menunjukkan pengaruh variabel-variabel antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai signifikan penggunaan sistem E-Musrenbang (X) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari pada 0,05 sedangkan t hitung sebesar $5,678 > 1,669$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X berpengaruh terhadap Y. Nilai regresi X sebesar 0,669 yang menunjukkan penggunaan sistem E-Musrenbang (X) memiliki hubungan positif terhadap efektivitas perencanaan pembangunan (Y). Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi penggunaan sistem E-Musrenbang akan semakin tinggi efektivitas perencanaan pembangunan.

Pengaruh Penggunaan Sistem E-Musrenbang Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan dengan Penganggaran Partisipatif Sebagai Variabel Pemoderasi.

Pengujian hipotesis dua ditujukan untuk menguji pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan dengan penganggaran partisipatif sebagai variabel pemoderasi. Maka metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah Uji MRA. Berikut adalah hasil regresi untuk hipotesis dua:

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi
Pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan dengan penganggaran partisipatif sebagai variabel pemoderasi

Simbol	Variabel	Koefisien	Std. Error	t-value	P
Persamaan Regresi 2: $Y = \alpha + b_1 X + b_2 Z$					
	Konstanta	α (7,079)	2,358	3,002	0,004
X	Penggunaan Sistem E-Musrenbang	b_1 (0,339)	0,109	3,115	0,003
Z	Penganggaran Partisipatif	b_2 (0,599)	0,095	6,292	0,000
		$R^2=0,743$	$F=44,436$	$P=0,000$	$n=75$
Persamaan Regresi 3: $Y = \alpha + b_1 X + b_2 Z + b_3 X*Z$					
	Konstanta	α (1,810)	20,200	0,090	0,929
X	Penggunaan Sistem E-Musrenbang	b_1 (0,594)	0,979	0,607	0,546
Z	Penganggaran Partisipatif	b_2 (0,814)	0,822	0,990	0,326
X*Z	Interaksi	b_3 (-0,010)	0,039	-0,263	794(TS)
		$R^2=0,744$	$F=29,264$	$P=0,000$	$n=75$ TS=Tidak Signifikan

Sumber: Data primer diolah

Untuk memudahkan pembahasan, berikut ini disajikan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dua (H2):

Tabel 9
Hasil Moderate Regression Analysis (MRA)
Untuk Menguji Hipotesis 2

Pers. ke	Persamaan Regresi	Nilai F (Sig.)	R ²
H2 (2)	$Y = 7,079 + 0,339X + 0,599Z$ (0,000)	44,436 (0,000)	0,552
(3)	$Y = 1,810 + 0,594X + 0,814Z + (-0,010) X*Z$ (0,794)	29,264 (0,000)	0,553

Y: Efektivitas Perencanaan Pembangunan X*Z = Interaksi dari X dan Z
X: Penggunaan Sistem E-Musrenbang
Z: Penganggaran Partisipatif

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil output SPSS, pada persamaan pertama nilai koefisien determinasi sebesar 0,306 atau 30,6%. Pada persamaan kedua yaitu persamaan pertama ditambah dengan variabel penganggaran partisipatif sebagai variabel independen menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien determinasinya berubah menjadi 0,552 atau 55,2%, yang berarti variabel penganggaran partisipatif mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan dengan variasi perubahannya sebesar 0,246 atau 24,6%. Sedangkan pada persamaan ketiga dilakukan uji moderasi penggunaan sistem E-Musrenbang dengan penganggaran partisipatif menunjukkan koefisien negatif (b3) sebesar -0,010 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,794 dan terjadi peningkatan koefisien determinasi menjadi 0,553 atau 55,3% sedangkan sisanya 44,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Dari hasil analisis ini, dengan didasarkan pada kriteria MRA berarti variabel penganggaran partisipatif bukan sebagai variabel pemoderasi, melainkan sebagai variabel prediktor independen terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

Pembahasan

Penggunaan sistem E-Musrenbang berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pembangunan

Sesuai dengan hasil uji regresi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan sistem E-Musrenbang berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pembangunan, yang berarti semakin tinggi penggunaan sistem E-Musrenbang oleh pegawai pada unit kerja pemerintah daerah Kota Surabaya maka efektivitas perencanaan pembangunan akan semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima keberadaanya.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Permendagri No. 54 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008, yang meliputi penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rencana akhir dan penetapan. Penelitian ini lebih berfokus pada tahapan musrenbang. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan musrenbang di wilayah pemerintah Kota Surabaya dengan sistem E-Musrenbang sebagai aplikasi penunjang dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan sesuai alur musrenbang mulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dilanjutkan tahap musyawarah forum SKPD dan forum musrenbang Kota. Sehingga sistem E-Musrenbang sebagai salahsatu wujud akuntabilitas dan transparansi kebijakan pemerintah memberikan pengaruh besar, sehingga partisipasi masyarakat berupa usulan pembangunan dapat terakomodir dengan baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Karuniawati (2017) yang menunjukkan bahwa efektivitas sistem E-Musrenbang di kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dikatakan sangat efektif. Sistem E-Musrenbang sangat membantu pegawai kecamatan dan kelurahan dalam mengembangkan efektivitas organisasi, mempertinggi efektivitas layanan dan mengembangkan kinerja pegawai dalam perencanaan pembangunan.

Hasil yang sama juga sejalan dengan penelitian Syahrir (2015) yang membuktikan bahwa penggunaan dapat merasakan keuntungan sistem E-Musrenbang dalam mendapatkan informasi mengenai perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat menggunakan sistem tersebut secara berulang, serta menggunakan layanan ini untuk tugas perencanaan pembangunan.

Penganggaran partisipatif sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh antara penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, penganggaran partisipatif tidak dapat memoderasi pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan karena nilai koefisien parameter negatif sebesar $-0,263$ dan signifikan sebesar $0,794 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penganggaran partisipatif tidak dapat memoderasi pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) tidak diterima atau ditolak.

Penganggaran partisipatif tidak dapat memoderasi pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan disebabkan karena dalam sistem E-Musrenbang telah ditetapkan pagu anggaran oleh pemerintah, walaupun masyarakat membuat rancangan anggaran pembangunan yang diajukan dalam musrenbang tidak boleh melebihi kapasitas pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah, hal tersebut ditetapkan pemerintah untuk pemerataan pembangunan daerah.

Sesuai penjelasan atas PP No. 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah salah satunya dimaksudkan untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. Dijelaskan pula dalam Pasal 17 (4) PP No. 8 Tahun 2008, Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berbeda dengan pendapat Yusri (2016) bawa penganggaran partisipatif merupakan proses penyusunan anggaran yang melibatkan masyarakat, penyusunan anggaran yang komprehensif dalam perusahaan dapat mempermudah diadakan evaluasi atas hasil pelaksanaan yaitu dengan melaporkan hasil pelaksanaan yang sesungguhnya, yang kemudian akan dibandingkan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Anggaran dapat mencegah terjadinya penghamburan sumberdaya baik bagi perusahaan swasta maupun pemerintah karena rencana kegiatan telah terkoordinasi didalamnya. Hasil penelitian yang berbeda dengan pendapat tersebut, diindikasikan karena perbedaan ruanglingkup partisipasi anggaran yang berbeda, dimana penganggaran partisipatif dalam penelitian ini adalah berasal dari masyarakat pada suatu lingkup pemerintahan kota Surabaya yang lebih luas dibandingkan dengan partisipasi penyusunan anggaran pada perusahaan swasta maupun pemerintahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penggunaan sistem E-Musrenbang berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan sistem E-Musrenbang yang dilakukan pegawai pada unit kerja pemerintah daerah Kota Surabaya maka efektivitas perencanaan pembangunan semakin meningkat. (2) Penganggaran partisipatif tidak dapat memoderasi pengaruh penggunaan sistem E-Musrenbang terhadap efektivitas perencanaan pembangunan pada unit kerja pemerintah daerah Kota Surabaya. Akan tetapi apabila diperhatikan pada persamaan regresi kedua, dapat diketahui bahwa penganggaran partisipatif mempengaruhi secara langsung efektivitas perencanaan pembangunan. Sehingga, penganggaran partisipatif bukan sebagai variabel pemoderasi, melainkan sebagai variabel prediktor independen terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup dalam penelitiannya, misalnya penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota lain atau lebih luas lagi pada Pemerintah Provinsi dengan menambah jumlah sampel untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal. (2) Sebaiknya penelitian berikutnya memperluas variabel yang digunakan dalam mengukur pengaruhnya terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. Misalnya anggaran berbasis kinerja dan edukasi anggaran. (3) Bagi peneliti selanjutnya, apabila menggunakan kuisioner agar menggunakan kata yang lebih beragam dan sistematika kuisioner yang lebih efektif sehingga dapat menghasilkan opini dan sikap responden yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. N. 2008. Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontinjensi Matching. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10(2): 69-76.
- Dwiandini, W. dan R.V. Salomo. 2013. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Administrasi Jakarta Timur. *Jurnal*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Fadil, F. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kota Baru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* 1(2): 251-261.
- Ghozali, I. 2006. *Apikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Apikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedelapan. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Karuniawati, R.D. 2017. Efektivitas *Electronic* Musyawarah Rencana Pembangunan (*E-Musrenbang*) di Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa UNESA*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masrizal. 2016. Tinjauan Sosiologis Perencanaan Pembangunan Berbasis Kamus E-Musrenbang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1(1): 29-39.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2014. Pelatihan Musrenbang. <https://ap.surabaya.go.id>. Diakses tanggal 15 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. 21 Oktober 2010. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. 4 Februari 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Jakarta.
- Riharjo, I. B. 2009. Pengaruh Desentralisasi Dan Komitmen Organisasional Terhadap Hubungan Antara Penganggaran Partisipatif Dan Kinerja Manajerial. *Jurnal Ekuitas* 13(3): 326-348.
- Setianingsih, B., E. Setyowati., dan Siswidiyanto. 2015. Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3(11): 1930-1936.
- Sigalingging, A.H., dan Warjio. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik* 4(4): 91-164.
- Sugiono, 2004. Konsep, Identifikasi, Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi* 1(2): 61-70.
- Syahrir, 2015. Analisis Penerapan Sistem Informasi E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Palopo. *Indonesian Journal on Networking and Security (IJNS)* 4(4): 61-66.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 5 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Jakarta.
- Yunas, N. S. 2017. Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7(1): 19-27.
- Yusri, W. O. 2016. Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sawahlunto. *Thesis*. Universitas Andalas. Padang.